

Tragedi Kereta Bekasi Timur: Antara Duka, Janji Negara, dan Hilangnya Kata Maaf

Category: NASIONAL

written by Redaksi | April 29, 2026



SEANTERONEWS.com – Senin malam, 27 April 2026, menjadi lembaran hitam bagi transportasi publik Indonesia. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun [Bekasi Timur](#) mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka. Namun, di tengah suasana duka yang mendalam, publik kini menyoroti tajam absennya pernyataan maaf dari pihak perusahaan taksi yang menjadi pemicu awal tragedi tersebut.

Kronologi: Bermula dari Mesin Mati di Perlintasan

Tragedi ini bermula ketika satu unit taksi listrik milik [Green SM](#) Indonesia mengalami mogok di perlintasan sebidang tidak

resmi di kawasan Bulak Kapal. Kendaraan tersebut tertemper KRL, yang kemudian mengakibatkan gangguan serius pada sistem persinyalan.

Akibat gangguan tersebut, KRL Commuter Line terhenti di jalur yang seharusnya steril. Naas, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah Gambir menghantam rangkaian KRL tersebut dari belakang. Benturan hebat ini menghancurkan gerbong dan menjepit puluhan penumpang di dalamnya.

Kritik Netizen: “Kalimat PR” vs Rasa Empati

Netizen dan keluarga korban menyayangkan sikap PT Green SM Indonesia yang dinilai hanya mengeluarkan pernyataan “steril” dan teknis tanpa adanya kata maaf yang tulus. Perusahaan tersebut dianggap berlindung di balik diksi investigasi tanpa menunjukkan tanggung jawab moral atas kelalaian armadanya yang memicu kecelakaan beruntun tersebut.

Berbeda dengan pihak taksi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara terbuka telah menyampaikan permohonan maaf dan menundukkan kepala atas kegagalan sistem keselamatan yang terjadi.

Respons Pemerintah: Santunan dan Anggaran Rp4 Triliun

Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau para korban di RSUD Kota Bekasi. Dalam kunjungannya, Presiden menjanjikan langkah konkret berupa perbaikan 1.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai Rp4 triliun.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya perawatan korban luka dan memberikan santunan sebesar Rp50 juta bagi setiap keluarga korban yang meninggal dunia.

Evaluasi Sistemik yang Terlambat

Meskipun pemerintah bergerak cepat memberikan santunan pascakejadian, banyak pihak menilai tindakan ini selalu terlambat. Perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Bulak Kapal telah dibiarkan tidak resmi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memakan korban jiwa dalam jumlah besar.

Tragedi Bekasi Timur bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan pengingat keras bagi negara dan pihak swasta bahwa keselamatan nyawa manusia tidak boleh dikalahkan oleh prosedur birokrasi atau citra perusahaan. Di negeri ini, mencegah kematian harusnya lebih utama daripada sekadar hadir setelah darah mengering di atas rel.